



**MINGGU, 27 JANUARI 2019**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Aset Senilai Rp 3,7 Triliun Terancam Hilang**

**BENGKULU** - Aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih banyak yang belum terdata dengan jelas. Terutama aset tanah. Diduga sebagian besar aset berupa tanah ini sudah dikuasai atau digarap masyarakat umum. Jika tidak segera dilakukan pendataan dan ditertibkan, maka aset daerah tersebut terancam hilang.

Selain itu, ada beberapa bangunan dan kendaraan yang juga masih belum terinventarisir Pemprov. Terhitung jumlah aset yang dimiliki Pemprov saat ini nilainya mencapai Rp 4,7 triliun. Sedangkan aset yang belum terdata ada senilai Rp 3,5 triliun, berupa tanah, gedung, kendaraan dan lainnya.

Lokasi aset-aset tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota. Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H Rohidin Mersyah, M.MA mengakui hal tersebut.

► *Baca ASET...Hal 7*



**ROHIDIN MERSYAH**

**“Sejak dahulu, tapi belum tuntas. Karena ada asetnya namun tidak ada sertifikatnya, kemudian ada sertifikatnya namun asetnya tidak jelas**



**SUMBER BERITA**

**MINGGU, 27 JANUARI 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Aset Senilai Rp 3,7 Triliun Terancam Hilang**

Sambungan dari halaman 1

Menurutnya, persoalan aset yang belum terdata dengan jelas ini merupakan persoalan lama. Bahkan ada beberapa aset yang dimiliki namun nilai perekonomiannya belum pasti. "Sejak dahulu, tapi belum tuntas. Karena ada asetnya namun tidak ada sertifikatnya, kemudian ada sertifikatnya namun asetnya tidak jelas. Ada asetnya, namun nilai perekonomiannya belum pasti," beber Rohidin.

Dikatakan Rohidin, persoalan ini sudah mencapai puluhan tahun, namun hal ini bukan terjadi di Provinsi Bengkulu saja. Ada beberapa daerah lainnya yang juga bermasalah dalam penilaian aset daerah. "Terutama yang dipinjam pakai sehingga harus kita tata kembali," ujarnya.

Terpisah, Kepala BPKD Provin-

si Bengkulu, Heru Susanto melalui Kabid Aset Syahrul juga mengakui masih banyak sekali tanah milik Pemprov Bengkulu belum bersertifikat. Hal ini menyebabkan lahan milik Pemprov Bengkulu sudah didirikan bangunan perumahan oleh developer atau pengembang perumahan.

"Masalah aset milik Pemprov Bengkulu, yang tidak jelas akan kita selesaikan secara persuasif melalui pendekatan dengan masyarakat dan mantan pejabat yang menguasai aset pemprov secara tidak sah alias ilegal tersebut, sebelum ditertibkan," terangnya.

Ia menambahkan, dalam penerbitan aset Pemprov Bengkulu, akan menggandeng Polda Bengkulu, Korem dan Kejaksaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk pembentukan tim

lainnya juga akan dilakukan sehingga permasalahan aset dapat diselesaikan secepatnya.

Kabid Humas Polda Bengkulu, AKBP. Sudarno menyatakan Polda Bengkulu siap membackup Pemprov yang ingin menertibkan aset dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Namun sejauh ini belum ada permintaan resmi dari pemprov.

"Kalau memang minta backup kita (polda) siap dalam rangka untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Penertiban aset itu bukan berarti harus langsung melakukan tindakan. Harus dengan cara persuasif, negosiasi dan lainnya. Semua ada proses sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Intinya, kita siap mendampingi dan mengawal untuk penertiban yang akan dilakukan pemprov," jelas Sudarno. **(tew)**